Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS (JPPI)
20(2): 149-157
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPPI

Tata Kelola Publik, Konteks Sosial, Keterlibatan Mahasiswa, dan Ketimpangan Pendidikan Tinggi

Alfiana Damasinta[a]*, Andi Zulitsnayarti Mardhani Syam[b], Rahmawati Sarizki Habie[c]
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
e-mail: *[a]alfiana.damasinta@unm.ac.id; [b]a.zulitsnayarti.mardhanisyam@unm.ac.id; [c]rahmahabie@unm.ac.id

Abstract: Educational inequality in higher education concerns differences in access, academic experience, persistence, and educational outcomes across social groups. This article develops a conceptual framework connecting public governance, social context, student engagement, and educational inequality. The approach is a conceptual study supported by a narrative review of theoretical works, policy perspectives, and selected empirical research. Sources are organised by their contribution to defining constructs, explaining relationships, and identifying the limits of interpretation. The analysis distinguishes governance at the system and institutional levels from students' social resources and engagement in learning. It proposes that institutional arrangements and social resources shape opportunities to participate, while engagement provides a possible link between these opportunities and educational outcomes. Five propositions specify relationships among governance, social context, engagement, and inequality. These propositions provide an agenda for empirical assessment rather than estimates of causal effects or statistical mediation. The framework also shows why improvements in average student outcomes cannot alone establish that gaps between social groups have narrowed. Institutional implications include examining barriers to support, adapting academic services to students' circumstances, and evaluating the distribution of benefits across groups. The article contributes an analytical basis for context-sensitive research and institutional decision-making. Its scope is limited by purposive source selection, the interpretive character of the analysis, and the absence of direct testing of the proposed framework in Indonesian higher education.

Keywords: public governance; educational inequality; social context; student engagement; higher education

Abstrak: Ketimpangan pendidikan tinggi mencakup perbedaan akses, pengalaman akademik, keberlanjutan studi, dan capaian pendidikan antarkelompok sosial. Artikel ini bertujuan mengembangkan kerangka konseptual yang menghubungkan tata kelola publik, konteks sosial, keterlibatan mahasiswa, dan ketimpangan pendidikan tinggi. Pendekatan yang digunakan adalah kajian konseptual dengan telaah literatur naratif terhadap karya teoretis, perspektif kebijakan, dan penelitian empiris terpilih. Sumber diorganisasi berdasarkan kontribusinya terhadap definisi konstruk, penjelasan hubungan, dan batas interpretasi. Analisis membedakan tata kelola pada tingkat sistem dan institusi dari sumber daya sosial mahasiswa serta keterlibatan dalam pembelajaran. Kerangka yang dikembangkan menempatkan pengaturan institusional dan sumber daya sosial sebagai kondisi yang membentuk kesempatan berpartisipasi. Keterlibatan diposisikan sebagai kemungkinan penghubung antara kesempatan tersebut dan capaian pendidikan. Lima proposisi merumuskan hubungan tata kelola, konteks sosial, keterlibatan, dan ketimpangan untuk menjadi agenda pengujian empiris. Proposisi tersebut tidak merupakan estimasi pengaruh kausal atau mediasi statistik. Kajian juga menegaskan bahwa peningkatan capaian rata-rata mahasiswa perlu dibedakan dari penyempitan kesenjangan antarkelompok sosial. Implikasi institusional meliputi pemeriksaan hambatan akses dukungan, penyesuaian layanan akademik dengan kondisi mahasiswa, dan evaluasi distribusi manfaat program. Kontribusi artikel terletak pada penyusunan dasar analitis bagi penelitian dan pengambilan keputusan yang sesuai konteks. Cakupan kajian dibatasi oleh pemilihan sumber secara purposif, sifat interpretatif analisis, dan belum adanya pengujian langsung terhadap kerangka yang diusulkan dalam konteks pendidikan tinggi Indonesia.

Kata kunci: tata kelola publik; ketimpangan pendidikan; konteks sosial; keterlibatan mahasiswa; pendidikan tinggi

How to Cite: Damasinta, A., Syam, A. Z. M., & Habie, R. S. (2026). Tata kelola publik, konteks sosial, keterlibatan mahasiswa, dan ketimpangan pendidikan tinggi. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS,* 20(2): 149-157.

Copyright © 2026 (Alfiana Damasinta, Andi Zulitsnayarti Mardhani Syam, Rahmawati Sarizki Habie)

Pendahuluan

Pemerataan pendidikan tinggi perlu dinilai melalui kesempatan memasuki perguruan tinggi sekaligus pengalaman dan capaian selama studi. Pertambahan mahasiswa dapat memperluas partisipasi, tetapi ukuran tersebut belum menjelaskan siapa yang mengakses institusi tertentu, mengikuti kegiatan akademik yang bernilai, dan menyelesaikan pendidikan. Triventi (2013) menempatkan stratifikasi di dalam pendidikan tinggi sebagai persoalan yang berkaitan dengan ketimpangan sosial. Karena itu, kajian pemerataan memerlukan perhatian terhadap perbedaan peluang antarkelompok, termasuk peluang setelah mahasiswa diterima.

Dalam artikel ini, ketimpangan pendidikan tinggi dipahami sebagai perbedaan akses, kesempatan belajar, keberlanjutan studi, dan capaian antarkelompok sosial. Perbedaan capaian individual belum cukup untuk disebut sebagai ketimpangan sosial. Analisis perlu mengidentifikasi kelompok pembanding, dimensi luaran, dan kondisi yang membentuk perbedaannya. Batas ini menjaga agar pembahasan tidak menyamakan seluruh variasi prestasi dengan ketidakadilan institusional.

Tata kelola publik memberi kerangka untuk memahami bagaimana keputusan pendidikan dibuat dan dijalankan. Perspektif Pierre dan Peters (2020) menekankan hubungan negara dengan aktor dan institusi lain dalam proses pengaturan masyarakat. Dalam pendidikan tinggi, perspektif tersebut dapat digunakan untuk membedakan kebijakan pada tingkat sistem, seperti pengaturan pendanaan dan akses, dari keputusan institusi mengenai layanan dan distribusi sumber daya. Kedua tingkat tersebut saling berkaitan, tetapi memerlukan penjelasan yang berbeda.

Kebijakan pendidikan juga perlu memperhatikan hubungan antara peserta didik, lingkungan belajar, dan sistem. OECD (2021) menggunakan ketiga tingkat tersebut untuk membahas respons kebijakan dan ketahanan pendidikan. Kerangka ini memberi alasan untuk memeriksa bagaimana keputusan institusional diterjemahkan menjadi kesempatan belajar yang dapat dimanfaatkan mahasiswa. Prinsip kebijakan yang responsif merupakan arah pertimbangan, sedangkan efektivitas setiap program tetap membutuhkan evaluasi pada konteks penerapannya.

Konteks sosial menunjukkan bahwa mahasiswa membawa sumber daya yang berbeda ke dalam perguruan tinggi. Bourdieu (1986) membedakan modal ekonomi, budaya, dan sosial serta menjelaskan hubungan di antara bentuk modal tersebut. Perspektif ini membantu memahami mengapa ketersediaan layanan yang sama dapat disertai kapasitas pemanfaatan yang berbeda. Dalam artikel ini, sumber daya sosial ditempatkan sebagai kondisi kesempatan, tanpa menganggap latar keluarga menentukan hasil setiap mahasiswa secara tetap.

Keterlibatan mahasiswa menambahkan perhatian pada pengalaman pembelajaran. Kuh (2009) menjelaskan perkembangan konsep keterlibatan dan National Survey of Student Engagement sebagai bagian dari penelitian institusional. Kahu (2013) memperluas pembacaan konsep tersebut melalui perspektif perilaku, psikologis, sosial budaya, dan holistik. Untuk menghindari pencampuran konsep, keterlibatan perlu dibedakan dari kondisi yang mendahuluinya dan dari capaian yang mungkin berkaitan dengannya.

Kahu dan Nelson (2018) mengembangkan gagasan educational interface untuk menjelaskan pertemuan karakteristik mahasiswa dan institusi. Gagasan tersebut membuka ruang untuk memahami keterlibatan sebagai pengalaman yang berlangsung dalam hubungan sosial dan kelembagaan. Kahu, Picton, dan Nelson (2020) memberikan ilustrasi empiris melalui pengalaman mahasiswa tahun pertama di satu universitas Australia. Bukti tersebut membantu menjelaskan dinamika keterlibatan, tetapi tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan pengaruh kebijakan nasional terhadap ketimpangan pendidikan tinggi.

Pendidikan tinggi juga mempunyai manfaat publik yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Marginson (2016) membahas hubungan pendidikan tinggi dengan common good, sehingga penilaian manfaat dapat melampaui keuntungan pendidikan bagi individu. Artikel ini menggunakan orientasi tersebut untuk mempertanyakan distribusi kesempatan dan manfaat. Hubungan antara pengembangan mahasiswa dan pemerataan menjadi lebih jelas ketika institusi memperhatikan siapa yang dapat mengakses dukungan dan memperoleh manfaatnya.

Persoalan analitis yang dibahas adalah cara menghubungkan keputusan tata kelola, perbedaan sumber daya sosial, dan keterlibatan mahasiswa tanpa mencampurkan tingkat penjelasannya. Literatur keterlibatan memberi penjelasan tentang pengalaman belajar, sedangkan kajian stratifikasi menempatkan perbedaan sosial sebagai persoalan distribusi kesempatan. Penyatuan kedua perspektif membutuhkan penjelasan tentang hubungan yang diusulkan, kondisi berlakunya, dan jenis bukti yang diperlukan untuk menilainya.

Kontribusi artikel adalah kerangka konseptual yang membedakan kesempatan yang tersedia, kapasitas memanfaatkannya, pengalaman keterlibatan, dan kesenjangan luaran. Kerangka ini menyusun hubungan antarkonstruk sebagai proposisi yang dapat diuji. Kerangka Kahu dan Nelson (2018) menjelaskan pertemuan karakteristik mahasiswa dan institusi melalui educational interface, dengan perhatian pada efikasi diri, emosi, rasa memiliki, dan kesejahteraan sebagai mekanisme psikososial keterlibatan dan keberhasilan studi. Artikel ini menggunakan hubungan mahasiswa dengan institusi tersebut sebagai landasan, lalu menempatkannya dalam pengaturan tata kelola publik dan distribusi sumber daya sosial. Kontribusi khususnya adalah memperjelas hubungan antarlevel analisis serta menilai distribusi manfaat keterlibatan antarkelompok, sehingga peningkatan capaian individual dapat dibedakan dari penyempitan kesenjangan sosial.

Kajian bertujuan menjelaskan posisi tata kelola publik dan konteks sosial dalam membentuk kesempatan pendidikan, menelaah peran keterlibatan mahasiswa dalam hubungan kesempatan dengan capaian, serta merumuskan proposisi dan implikasi institusional yang sesuai dengan cakupan analisis. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana hubungan antarkonstruk dapat digunakan untuk memahami perbedaan peluang dan capaian antarkelompok sosial di pendidikan tinggi.

Metodologi

Artikel menggunakan pendekatan kajian konseptual dengan telaah literatur naratif. Tujuannya adalah memperjelas konstruk dan menyusun penjelasan hubungan, bukan menghitung prevalensi temuan atau besaran pengaruh. Snyder (2019) menjelaskan bahwa bentuk telaah literatur perlu dipilih menurut tujuan kajian dan jenis kontribusi yang diharapkan. Pendekatan naratif digunakan di sini untuk mempertemukan perspektif tata kelola, modal sosial dan budaya, keterlibatan mahasiswa, serta ketimpangan pendidikan tinggi.

Bahan kajian berupa karya teoretis, pembahasan kebijakan, dan penelitian empiris yang dirujuk secara eksplisit dalam artikel. Pemilihan sumber bersifat purposif berdasarkan relevansinya terhadap definisi konstruk, penjelasan hubungan, atau penentuan batas interpretasi. Korpus akhir mencakup 13 rujukan terbitan 1986–2025, terdiri atas 12 sumber substantif dan Snyder (2019) sebagai rujukan metodologis. Karya klasik dipertahankan untuk landasan teori; sumber terbitan 2023–2025 memperbarui ilustrasi empiris dan konteks kebijakan Indonesia. Tabel 1 menjelaskan fungsi sumber utama sehingga pembaca dapat menelusuri dasar argumen. Telaah ini tidak dimaksudkan sebagai inventarisasi menyeluruh seluruh publikasi pada topik tersebut.

Penelusuran tambahan untuk pemutakhiran kajian dilakukan pada 13 Oktober 2026 melalui mesin pencari web, kemudian diverifikasi pada laman penerbit jurnal, repositori institusi penulis, dan laman resmi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Kata kunci mencakup “student engagement”, “higher education”, “socioeconomic inequality”, “educational interface”, “Indonesia”, dan “KIP Kuliah 2025”, dengan kombinasi sesuai fokus hubungan yang ditelaah. Sumber dipilih apabila membahas konstruk atau hubungan yang relevan, berupa artikel ilmiah atau informasi kebijakan resmi, serta mempunyai identitas bibliografis dan isi yang dapat diverifikasi. Hasil duplikat dan sumber yang tidak sesuai fokus tidak digunakan. Penelusuran ini menambahkan Wanti, Wesselink, Biemans, dan den Brok (2023), Lee, Kim, Su, dan Greenwood (2024), dan Kemdiktisaintek (2025). Wanti dkk. dibaca melalui teks penuh pada laman penerbit, Lee dkk. melalui abstrak pada repositori University at Buffalo, dan informasi KIP Kuliah melalui laman resmi kementerian. Penggunaan Lee dkk. dibatasi pada pola umum yang disebutkan dalam abstrak, tanpa mengambil besaran efek atau rincian analisis yang tidak diakses.

Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS (JPPI)
20(2): 149-157
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPPI

Unit analisis adalah konsep, argumen, dan hubungan yang dibahas dalam sumber rujukan. Analisis dilakukan dengan mencatat konstruk, tingkat analisis, konteks, hubungan yang dibahas, dan batas penggunaan setiap sumber; membandingkan fokus penjelasan antarsumber; serta menyusun hubungan yang mempunyai dasar konseptual. Hubungan tersebut kemudian diperiksa menurut tingkat analisis, urutan penjelasan yang diusulkan, dan kemungkinan penjelasan alternatif. Hasilnya berupa kerangka hubungan dan proposisi yang disajikan pada Gambar 1 dan Tabel 2.

Analisis memisahkan pernyataan yang berasal dari sumber, interpretasi penghubung antarperspektif, dan rekomendasi yang dikembangkan dalam artikel. Sumber teoretis tidak diperlakukan sebagai hasil pengujian empiris. Temuan dari suatu konteks tidak digeneralisasi sebagai pola universal, dan hubungan konseptual tidak ditafsirkan sebagai mediasi statistik. Keterlacakan sitasi dan penjelasan batas penerapan menjadi dasar penilaian argumen, sedangkan pengujian efektivitas atau pengaruh memerlukan penelitian lanjutan.

Tabel 1. Sumber utama dan fungsi dalam kajian konseptual

Fokus	Sumber	Fungsi analitis	Batas penggunaan
Tata kelola	Pierre dan Peters (2020)	Kerangka hubungan negara, aktor, dan institusi dalam proses pengaturan.	Landasan konsep tata kelola; tidak mengukur pemerataan mahasiswa.
Respons kebijakan	OECD (2021)	Membedakan tingkat peserta didik, lingkungan belajar, dan sistem.	Perspektif kebijakan pendidikan; bukan evaluasi program kampus tertentu.
Sumber daya sosial	Bourdieu (1986)	Menjelaskan modal ekonomi, budaya, dan sosial sebagai sumber daya yang tidak merata.	Landasan teoretis; tidak menentukan hasil setiap mahasiswa.
Keterlibatan	Kahu (2013); Kuh (2009); Kahu dan Nelson (2018)	Membedakan keterlibatan, kondisi pendahulu, dan konsekuensinya.	Kerangka pengalaman mahasiswa; tidak membuktikan penyempitan kesenjangan.
Ilustrasi keterlibatan	Kahu dkk. (2020)	Penelitian longitudinal pengalaman mahasiswa tahun pertama di Australia.	Satu konteks institusi; penggunaan dibatasi pada dinamika keterlibatan.
Stratifikasi pendidikan tinggi	Triventi (2013)	Kajian perbandingan stratifikasi pendidikan tinggi dan ketimpangan sosial.	Konteks negara Eropa; bukan bukti langsung tentang Indonesia.
Manfaat publik	Marginson (2016)	Orientasi analisis mengenai manfaat publik pendidikan tinggi.	Dasar pertimbangan normatif; bukan estimasi pengaruh kebijakan.
Dukungan sosial di Indonesia	Wanti dkk. (2023)	Ilustrasi empiris peran keluarga, pendampingan, dosen, dan teman sebaya dalam akses dan pemerataan.	Studi kualitatif satu universitas Indonesia; tidak mengestimasi besaran pengaruh.
Distribusi kesempatan belajar	Lee dkk. (2024)	Ilustrasi ketimpangan rasial dan sosial ekonomi dalam partisipasi pada praktik pembelajaran berdampak tinggi.	Abstrak pada repositori institusi; konteks Amerika Serikat; tidak digunakan untuk rincian efek.
Konteks kebijakan Indonesia	Kemdiktisaintek (2025)	Deskripsi KIP Kuliah 2025 sebagai dukungan biaya pendidikan dan biaya hidup.	Informasi resmi program; bukan evaluasi efektivitas atau bukti penyempitan kesenjangan.

Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS (JPPI)
20(2): 149-157
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPPI

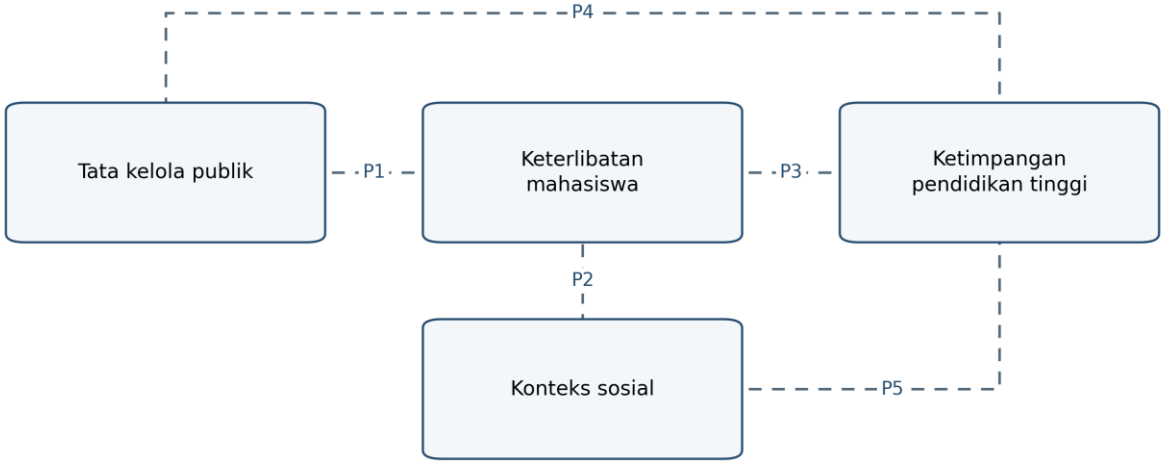
Hasil

Analisis menempatkan tata kelola publik sebagai pengaturan kesempatan pada tingkat sistem dan institusi. Keputusan mengenai pendanaan, layanan akademik, dan saluran partisipasi menentukan jenis kesempatan yang dapat ditawarkan. Dalam kerangka yang dikembangkan, kualitas tata kelola perlu dibaca melalui hubungan keputusan dengan akses mahasiswa terhadap dukungan. Hubungan ini merupakan penerapan perspektif tata kelola pada persoalan pendidikan tinggi dan tidak menetapkan bahwa satu prinsip administratif selalu menghasilkan pemerataan.

Konteks sosial diposisikan sebagai perbedaan sumber daya yang berkaitan dengan pemanfaatan kesempatan. Modal ekonomi dapat digunakan untuk menjelaskan batas pembiayaan dan waktu belajar, sedangkan modal budaya dan sosial memberi sudut pandang mengenai pemahaman aturan akademik serta akses pada informasi dan dukungan. Penjelasan ini menghubungkan teori modal dengan situasi mahasiswa. Kapasitas tersebut dapat berkembang selama studi, sehingga institusi tetap mempunyai ruang untuk menyesuaikan lingkungan belajar dan layanan.

Keterlibatan mahasiswa dipahami sebagai partisipasi dan investasi dalam pembelajaran, termasuk dimensi perilaku, kognitif, dan emosional. Kahu dan Nelson (2018) memberi dasar untuk membaca pengalaman tersebut dalam pertemuan kondisi mahasiswa dan institusi. Kahu dkk. (2020), melalui wawancara mingguan dengan 19 mahasiswa tahun pertama di Australia, menunjukkan sifat kontekstual dan dinamis keterlibatan. Artikel ini menggunakan temuan tersebut sebagai ilustrasi pengalaman mahasiswa, tanpa menganggapnya sebagai pengujian hubungan tata kelola publik dengan ketimpangan.

Ketimpangan ditempatkan sebagai perbedaan kesempatan dan luaran antarkelompok sosial yang perlu dianalisis secara khusus. Model membedakan hubungan keterlibatan dengan capaian individual dari hubungan keterlibatan dengan kesenjangan. Jika peningkatan pengalaman belajar lebih mudah diakses kelompok yang sudah memiliki sumber daya, capaian rata-rata dapat membaik tanpa menjamin penyempitan kesenjangan. Kemungkinan tersebut menjadi dasar perumusan hubungan yang bersyarat dan agenda pengujian pada Tabel 2.



Gambar 1. Hubungan konseptual tata kelola konteks sosial keterlibatan dan ketimpangan

Garis putus-putus pada Gambar 1 menunjukkan hubungan yang diusulkan untuk dianalisis, tanpa menetapkan arah pengaruh kausal. Label P1–P5 mengacu pada proposisi pada Tabel 2. Keempat konstruk dihubungkan melalui penjelasan kesempatan dan pemanfaatannya, tetapi bukti untuk setiap hubungan memerlukan rancangan yang sesuai. Model juga memungkinkan hubungan timbal balik, seperti pengalaman keterlibatan mahasiswa yang memberi masukan bagi perbaikan layanan institusi.

Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS (JPPI)
20(2): 149-157
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPPI

Tabel 2. Proposisi dan arah pengujian empiris

Kode	Proposisi	Dasar penjelasan	Fokus pengujian
P1	Tata kelola berkaitan dengan keterlibatan melalui keterjangkauan dukungan dan kesempatan partisipasi.	Koordinasi institusional dan hubungan mahasiswa dengan lingkungan belajar.	Hubungan layanan yang dapat diakses dengan dimensi keterlibatan.
P2	Konteks sosial berkaitan dengan keterlibatan melalui kapasitas memanfaatkan kesempatan akademik.	Perbedaan modal dan pengalaman mahasiswa dalam institusi.	Variasi pengalaman menurut sumber daya, dukungan, dan kondisi mahasiswa.
P3	Hubungan keterlibatan dengan penyempitan kesenjangan bergantung pada distribusi kesempatan dan manfaatnya.	Peningkatan capaian individual perlu dibedakan dari perubahan kesenjangan sosial.	Bandingkan proporsi mahasiswa yang tetap aktif pada semester ketiga antara kelompok 40% pengeluaran keluarga per kapita terendah dalam kohort dan 60% lainnya. Ukur selisih absolut dalam poin persentase dan perubahan selisih tersebut selama studi atau antarkohort.
P4	Tata kelola berkaitan dengan ketimpangan melalui pengaturan akses dan distribusi dukungan.	Pengaturan sistem dan institusi dapat membentuk kesempatan yang tersedia.	Distribusi akses layanan, keberlanjutan studi, dan capaian antarkelompok.
P5	Konteks sosial berkaitan dengan ketimpangan melalui perbedaan sumber daya dan jalur kesempatan pendidikan.	Teori modal dan perspektif stratifikasi pendidikan tinggi.	Perbedaan luaran menurut latar sosial dengan mempertimbangkan konteks institusi.

P1 dan P4 menggabungkan perspektif tata kelola dari Pierre dan Peters (2020) dengan perhatian pada manfaat publik dari Marginson (2016). P2 dan P5 menghubungkan teori modal Bourdieu (1986) dengan perspektif stratifikasi pendidikan tinggi. P3 merupakan proposisi yang dikembangkan dalam artikel ini: relevansi keterlibatan bagi pemerataan harus diperiksa melalui distribusi manfaat antarkelompok. Proposisi tersebut tidak diklaim sebagai temuan langsung dari satu sumber atau sebagai hubungan yang telah teruji.

Pembahasan

Kerangka ini memusatkan penjelasan pada hubungan kesempatan yang disediakan institusi dengan kondisi mahasiswa dalam memanfaatkannya. Dengan menghubungkan perspektif Pierre dan Peters (2020) serta Kahu dan Nelson (2018), pengaturan tata kelola dapat dipahami sebagai kondisi layanan, tetapi mahasiswa mengalami layanan melalui kondisi sosial dan pengalaman pembelajaran. Penjelasan tersebut membantu mempertahankan hubungan tingkat sistem, institusi, dan mahasiswa tanpa menyatukannya sebagai satu variabel yang memiliki makna seragam.

Pemisahan tingkat analisis mempunyai konsekuensi bagi penelitian. Aturan pendanaan nasional berada pada tingkat sistem, sedangkan persepsi mahasiswa terhadap layanan berada pada tingkat pengalaman individual. Keduanya dapat berkaitan, tetapi pengujian tidak cukup dilakukan dengan memberi nama yang sama pada indikatornya. Penelitian perlu menjelaskan keputusan yang dibahas, unit pengamatan, dan cara keputusan itu hadir dalam pengalaman mahasiswa.

Perspektif modal Bourdieu (1986) digunakan untuk menjelaskan hambatan pemanfaatan kesempatan. Sebagai ilustrasi konseptual, dua mahasiswa dapat memperoleh informasi kegiatan

akademik yang sama, tetapi menghadapi batas waktu, biaya, dan jaringan dukungan yang berbeda. Contoh ini menggambarkan kemungkinan mekanisme yang perlu diperiksa dalam konteks nyata. Penjelasannya juga membuka perhatian pada bentuk dukungan yang memperluas kemampuan mahasiswa untuk menggunakan kesempatan yang tersedia.

Institusi dapat merespons perbedaan tersebut melalui desain layanan yang memperhitungkan kebutuhan mahasiswa. Pendampingan akademik, penjelasan prosedur yang mudah dipahami, dan jadwal dukungan yang sesuai dapat dipertimbangkan ketika hambatan terletak pada akses informasi atau waktu. Jika hambatan berkaitan dengan pembiayaan, dukungan akademik saja mungkin kurang memadai. Pilihan program perlu didasarkan pada pemeriksaan kebutuhan dan tidak dapat ditentukan hanya dari label latar sosial.

Dalam konteks Indonesia, Wanti dkk. (2023) menelaah mahasiswa berlatar sosial ekonomi rendah melalui wawancara dengan mahasiswa, dosen, dan staf pendukung, serta diskusi kelompok di satu universitas. Studi tersebut menunjukkan peran keluarga dan program pendampingan dalam akses ke perguruan tinggi, serta peran dosen dan teman sebaya dalam pemerataan pengalaman selama studi. Temuan ini memberi ilustrasi bahwa dukungan sosial perlu diperhatikan bersama bantuan finansial. Dalam kerangka artikel ini, pendampingan dan jejaring dukungan dapat ditelaah sebagai bagian dari kapasitas memanfaatkan kesempatan akademik; penerapannya tetap perlu diperiksa pada institusi yang berbeda.

Mengikuti pembedaan konsep yang dibahas Kahu (2013), penggunaan keterlibatan perlu memperhatikan perbedaan antara kehadiran, pengalaman, dan investasi dalam belajar. Frekuensi kegiatan memberikan sebagian informasi tentang partisipasi, sementara pemahaman materi dan pengalaman emosional memerlukan perhatian yang berbeda. Kehadiran yang rendah, misalnya, dapat menandai hambatan akses atau prioritas waktu tertentu. Penelitian perlu memeriksa penjelasan tersebut sebelum menggunakan tingkat partisipasi sebagai ukuran tunggal kesungguhan mahasiswa.

Hubungan keterlibatan dan pemerataan bersifat bersyarat dalam model ini. Mahasiswa dapat mengalami peningkatan capaian melalui kesempatan belajar yang lebih baik, tetapi pemerataan menyangkut distribusi peningkatan tersebut. Jika kesempatan tambahan terutama dimanfaatkan kelompok yang telah mempunyai sumber daya, program dapat memberi manfaat individual yang nyata tanpa mengurangi kesenjangan. P3 mengarahkan perhatian pada persoalan distribusi itu dan memerlukan pengujian antarkelompok.

Lee dkk. (2024) memperlihatkan ketimpangan rasial dan sosial ekonomi dalam partisipasi pada praktik pembelajaran berdampak tinggi di perguruan tinggi Amerika Serikat. Praktik yang ditelaah mencakup keterlibatan akademik dan sosial budaya, penelitian, magang, serta kegiatan sukarela. Sebagai interpretasi penghubung dalam kajian ini, temuan tersebut menambah alasan untuk membedakan ketersediaan kegiatan dari pemerataan kesempatan mengikutinya. Konteks Amerika Serikat dan akses sumber melalui abstrak membatasi penggunaannya sebagai ilustrasi pola umum, bukan bukti langsung bagi pendidikan tinggi Indonesia.

Evaluasi institusional karena itu perlu menggabungkan informasi capaian rata-rata dengan distribusinya. Penurunan jumlah mahasiswa yang berhenti studi, misalnya, dapat disertai perubahan kesenjangan yang berbeda menurut kelompok. Perbandingan dapat memperhatikan akses terhadap bantuan, keberlanjutan studi, dan capaian pada kelompok dengan kondisi sosial yang relevan. Penentuan kelompok harus mengikuti konteks dan kualitas data, serta menghindari pelabelan yang menyederhanakan pengalaman mahasiswa.

Sebagai operasionalisasi yang diusulkan untuk P3, pengelompokan ekonomi dapat ditetapkan dari pengeluaran keluarga per kapita pada awal studi. Dalam satu kohort, kelompok 40% dengan pengeluaran terendah dapat dibandingkan dengan 60% lainnya. Tingkat keberlanjutan studi dihitung sebagai proporsi mahasiswa yang tetap aktif pada semester ketiga dari seluruh mahasiswa yang masuk pada tiap kelompok. Kesenjangan diukur melalui selisih absolut kedua proporsi dalam poin persentase. Penyempitan selisih perlu dibaca bersama peningkatan keberlanjutan kelompok dengan sumber daya lebih terbatas agar penurunan capaian kelompok pembanding tidak disalahartikan sebagai perbaikan

pemerataan. Perbandingan sepanjang waktu atau antarkohort perlu mempertimbangkan capaian awal, program studi, dan akses dukungan; perbedaan deskriptif saja belum membuktikan pengaruh kausal layanan.

Pelibatan mahasiswa dalam keputusan layanan dapat dipertimbangkan sebagai cara memperoleh informasi tentang hambatan yang dialami. Akan tetapi, saluran partisipasi perlu dinilai menurut siapa yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk menggunakannya. Masukan dari mahasiswa yang aktif berorganisasi mungkin belum menggambarkan kebutuhan mahasiswa yang menghadapi keterbatasan partisipasi. Institusi dapat mengombinasikan forum perwakilan dengan cara lain untuk menjangkau pengalaman yang kurang terwakili.

Orientasi manfaat publik dari Marginson (2016) memberi alasan untuk menilai keterjangkauan dukungan dan distribusi manfaatnya. Kerangka ini dapat membantu institusi menyusun pertanyaan evaluasi, tetapi tidak menentukan program terbaik untuk semua perguruan tinggi. Kesesuaian program bergantung pada karakteristik mahasiswa, sumber daya institusi, serta hambatan yang teridentifikasi. Pertimbangan efektivitas juga perlu membedakan tujuan meningkatkan mutu pengalaman belajar dari tujuan mengurangi kesenjangan.

Contoh penerapan di Indonesia dapat dirumuskan melalui KIP Kuliah 2025, yang menyediakan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi (Kemdiktisaintek, 2025). Dalam kerangka yang diusulkan, dukungan pembiayaan tersebut dapat dikaji bersama akses pendampingan akademik, informasi layanan, dan kesempatan mengikuti kegiatan pembelajaran. Perguruan tinggi dapat memantau penerimaan dukungan, partisipasi, serta keberlanjutan studi menurut kelompok ekonomi. Status penerima KIP Kuliah dapat menjadi informasi tambahan dan perlu dibedakan dari ukuran kondisi ekonomi keluarga. Contoh ini merupakan usulan penggunaan kerangka untuk evaluasi institusional; informasi program yang dirujuk belum menunjukkan efektivitas dukungan ataupun penyempitan kesenjangan.

Agenda penelitian lanjutan dapat dimulai dengan memilih satu luaran, seperti keberlanjutan studi, lalu menghubungkannya dengan pengalaman layanan dan keterlibatan sepanjang waktu. Data longitudinal memberi ruang untuk memeriksa urutan perubahan, sedangkan penelitian lintas institusi dapat membandingkan pengaturan dukungan. Analisis perlu mempertimbangkan kondisi awal, sumber daya sosial, dan kemungkinan bahwa capaian sebelumnya turut membentuk keterlibatan. Klaim mediasi membutuhkan pengujian jalur yang sesuai dengan rancangan dan asumsi analisisnya.

Penelitian kualitatif dapat melengkapi agenda tersebut dengan menjelaskan bagaimana mahasiswa memahami layanan dan mengalami hambatan. Wawancara atau penelusuran pengalaman belajar dapat digunakan untuk memeriksa apakah pengaturan yang tampak terbuka benar-benar dapat dimanfaatkan. Pendekatan ini membantu menilai penjelasan yang belum tercakup dalam indikator kuantitatif, termasuk pengalaman mahasiswa yang tetap berhasil meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya.

Cakupan kajian dibatasi oleh pemilihan sumber secara purposif dan analisis interpretatif. Kerangka ini tidak memberi gambaran menyeluruh seluruh literatur, tidak menghitung besaran efek, dan tidak menilai kualitas metodologis seluruh penelitian pada topik tersebut. Pilihan perspektif dapat memengaruhi hubungan yang lebih mendapat perhatian. Bukti ilustratif dari Australia, Eropa, dan Amerika Serikat mempunyai batas transfer ke Indonesia, sedangkan studi Indonesia yang ditambahkan mencakup satu universitas. Informasi KIP Kuliah digunakan untuk memahami desain dukungan, bukan sebagai evaluasi keberhasilannya. Pengujian model pada pendidikan tinggi Indonesia memerlukan pemeriksaan kondisi kebijakan, institusi, dan mahasiswa secara langsung.

Kesimpulan

Kajian ini menghasilkan kerangka konseptual yang menghubungkan tata kelola publik, konteks sosial, keterlibatan mahasiswa, dan ketimpangan pendidikan tinggi melalui pengaturan kesempatan serta kapasitas pemanfaatannya. Tata kelola menjelaskan keputusan pada tingkat sistem dan institusi, konteks sosial menjelaskan perbedaan sumber daya, dan keterlibatan menjelaskan pengalaman

pembelajaran yang berlangsung dalam kedua kondisi tersebut. Kontribusi kerangka terletak pada pemisahan capaian individual dari perubahan kesenjangan antarkelompok. Lima proposisi memberi arah pengujian hubungan tanpa menyatakan pengaruh kausal atau mediasi yang telah terbukti. Selisih keberlanjutan studi antarkelompok ekonomi menjadi salah satu contoh ukuran kesenjangan yang dapat digunakan dalam pengujian lanjutan. Perguruan tinggi dapat menggunakan kerangka untuk mengidentifikasi hambatan dukungan dan menyusun evaluasi distribusi manfaat program. Pemilihan sumber yang purposif, sifat interpretatif analisis, dan batas konteks penelitian terdahulu membatasi generalisasi. Penelitian lanjutan perlu memeriksa urutan hubungan, variasi antarkelompok, dan kesesuaian pengaturan dukungan pada konteks institusi yang diteliti.

Referensi

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). New York, NY: Greenwood Press.

Kahu, E. R. (2013). Framing student engagement in higher education. *Studies in Higher Education, 38*(5), 758–773. doi:10.1080/03075079.2011.598505

Kahu, E. R., & Nelson, K. (2018). Student engagement in the educational interface: Understanding the mechanisms of student success. *Higher Education Research & Development, 37*(1), 58–71. doi:10.1080/07294360.2017.1344197

Kahu, E. R., Picton, C., & Nelson, K. (2020). Pathways to engagement: A longitudinal study of the first-year student experience in the educational interface. *Higher Education, 79*, 657–673. doi:10.1007/s10734-019-00429-w

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025, 4 Februari). *Pembukaan pendaftaran KIP Kuliah 2025: Pemerintah perkuat komitmen akses pendidikan tinggi yang merata*. Retrieved from https://www.kemdiktisaintek.go.id/news/article/pembukaan-pendaftaran-kip-kuliah-2025-pemerintah-perkuat-komitmen-akses-pendidikan-tinggi-yang-merata

Kuh, G. D. (2009). The National Survey of Student Engagement: Conceptual and empirical foundations. *New Directions for Institutional Research, 2009*(141), 5–20. doi:10.1002/ir.283

Lee, J., Kim, N., Su, M., & Greenwood, S. (2024). What high-impact practices work for minoritized students? Institutional inequities in college learning opportunities and outcomes. *Trends in Higher Education, 3*(2), 180–198. doi:10.3390/higheredu3020011

Marginson, S. (2016). *Higher education and the common good*. Carlton, Australia: Melbourne University Publishing.

OECD. (2021). *Education policy outlook 2021: Shaping responsive and resilient education in a changing world*. Paris, France: OECD Publishing. doi:10.1787/75e40a16-en

Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). *Governance, politics and the state* (2nd ed.). London, England: Red Globe Press.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. doi:10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Triventi, M. (2013). Stratification in higher education and its relationship with social inequality: A comparative study of 11 European countries. *European Sociological Review, 29*(3), 489–502. doi:10.1093/esr/jcr092

Wanti, M., Wesselink, R., Biemans, H., & den Brok, P. (2023). The role of social factors in access to and equity in higher education for students with low socioeconomic status: A case study from Indonesia. *Equity in Education & Society, 2*(1), 43–60. doi:10.1177/27526461221140570